

## **Kemandirian dan Efektivitas dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan**

### ***Independence and Effectiveness In Implementing Autonomy of Regency and City in South Kalimantan Province***

**Muhammad Faisal Perdana Putera**

Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat  
[mfaisalpp24@gmail.com](mailto:mfaisalpp24@gmail.com)

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to examine the performance of regional finance at the district and municipal governments in South Kalimantan province based on the independence and effectiveness of regional finance period 2012 to 2016 as well as the trend of regional financial effectiveness and effectiveness period 2012 to 2016. The type of research used is descriptive, Regency, and City in South Kalimantan Province and the sample of all districts and cities in South Kalimantan Province. Secondary data were obtained from the Regional Finance Board of South Kalimantan Province and Directorate General of Balance of Ministry of Finance. Analytical techniques used are the ratio of independence and local financial effectivity and percentage trend of independence and effectiveness of regional finance.*

*The results obtained in this study are: 1) The ratio of regional autonomy in general in 2012 to 2016 into a deficient category. 2) The effectiveness ratio of local finance in general from 2012 to 2016 is effective except the Upper River Central Regency is in a balanced category 3) The trend of regional autonomy has a good development unless the Regency of Banjar in 2015 and 2016 is below 100 percent. 4) Trend of regional financial effectiveness from 2013 until 2016 tends to have a positive trend. There are four areas and tend to experience negative trend direction. There is 8 area.*

**Keywords:** *Independence, Effectiveness, Regional Autonomy*

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian adalah untuk menguji kinerja keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada tahun 2012 sampai 2016 serta trend kemandirian dan efektivitas keuangan daerah periode 2012 sampai 2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan populasi yaitu Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dan sampel yaitu seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan yaitu sekunder diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah rasio kemandirian dan efektivitas keuangan daerah serta persentase trend kemandirian dan efektivitas keuangan daerah. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 1) Rasio kemandirian daerah secara umum pada tahun 2012 sampai 2016 masuk kriteria rendah sekali. 2) Rasio efektivitas Keuangan daerah secara umum pada tahun 2012 sampai 2016 masuk kategori efektif kecuali Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada kategori berimbang 3) Trend kemandirian daerah mengalami perkembangan yang baik kecuali Kabupaten Banjar pada tahun 2015 dan 2016 berada dibawah 100 persen. 4) Trend efektivitas keuangan daerah pada tahun 2013 sampai 2016 cenderung trend positif ada 4 daerah dan yang cenderung mengalami arah trend negatif ada 8 daerah.

**Kata Kunci:** Kemandirian, Efektivitas, Otonomi Daerah

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pemerataan merupakan isu penting yang harus diselesaikan pemerintah pusat, adanya wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengatur pemerintahan diharapkan dapat mengurus, dan meningkatkan potensi serta kesejahteraan masyarakat melalui otonomi di daerah masing-masing. Adanya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah akan membantu pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan daerah (Suparmoko, 2002).

Diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Memberikan perubahan yang mendasar dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia, berdasarkan dengan kedua undang undang tersebut diharapkan dapat mendorong berkembangnya suatu daerah, melalui otonomi daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan kewenangan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan potensi serta kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kepentingan masyarakat berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, Instansi vertikal dan tugas pembantuan yang diatur berdasarkan pembagian tugas, kewenangan serta tanggung jawab antara rangkaian pemerintahan. Pembagian keuangan pemerintah pusat antar daerah haruslah adil, demokratis, transparan, serta efisien sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan potensi daerah tersebut.

Kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sangatlah penting, daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah dilihat dari kemampuan dalam meningkatkan dan mengelola sumber pendapatan daerahnya yang digunakan untuk membiayai urusan pemerintah daerahnya. Artinya suatu daerah dapat dikatakan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah dilihat dari pada kinerja dari kemampuan keuangan daerah. Serta ketergantungan yang seminimal mungkin kepada pemerintah pusat dan menjadikan PAD sebagai sumber utama pendapatan keuangan daerah. (Halim, 2001) Ciri daerah yang mampu dalam melaksanakan otonomi adalah 1) suatu daerah mampu dalam memperoleh sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai kegiatan pemerintahan. 2) mengurangi tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat, dan menjadikan PAD menjadi sumber pemasukan utama daerah.

Mengelola dan meningkatkan sumber-sumber PAD merupakan tantangan dalam meningkatkan pembangun daerah masing-masing, kemampuan daerah otonom dalam melaksanakan pemerintahan yang mandiri merupakan suatu capaian yang baik dalam pemerintahan daerah. Ada beberapa hal yang dapat menghambat suatu daerah dapat mandiri,

yaitu lebih dominannya transfer pusat ke daerah, BUMD kurang berperan dalam memberikan pemasukan terhadap Pendapatan Asli daerah, terfokus pada tingginya derajat sentralisasi pada sektor pajak, potensi pajak dan retribusi yang beragam, akan tetapi hanya sedikit yang dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan, dan pemberian subsidi yang lemah dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan perlu mengetahui kondisi keuangan daerahnya sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mengelola keuangan daerahnya. Kemampuan kinerja keuangan yang baik akan memberikan dampak baik terhadap pembangunan di daerah. Dalam menganalisis kemampuan pengelolaan daerah dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai pada periode sekarang dengan periode sebelumnya atau dengan cara membandingkan kemampuan keuangan daerah dengan daerah yang lainnya yang masih dalam ruang lingkup wilayah tersebut. Dalam mengukur pengelolaan keuangan daerah bisa dilakukan dengan beberapa rasio seperti: Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Proporsi (Halim, 2007)

Rasio kemandirian daerah digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur seberapa besar pencapaian anggaran PAD. Kinerja yang baik dalam merealisasikan PAD tidak menjamin suatu daerah bisa mandiri, apabila tidak diimbangi dengan mengurangi ketergantungan dana pusat dan daerah. artinya efektivitas PAD dan Kemandirian daerah harus berjalan secara bersamaan untuk tercapainya suatu daerah yang mandiri.

Penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya oleh Dori Saputra 2008 dengan judul Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kemandirian daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, secara keseluruhan tahun 2004 sampai 2011 berada pada rata-rata 6,5% masuk dalam kategori sangat rendah. Dan efektivitas PAD secara keseluruhan tahun 2004 sampai 2011 berada pada rata-rata sebesar 109,8% masuk pada kategori efektif. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, peneliti ingin mengetahui kemampuan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan kemandirian daerah dan efektivitas. Maka peneliti mengambil judul **“Kemandirian Dan Efektivitas Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.**

Rumusan permasalahan: 1) Bagaimanan kondisi kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 2) Bagaimanan kondisi efektivitas Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 3) Bagaimanan trend kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 4) Bagaimanan trend efektivitas Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan penelitian antara lain: 1) Mengetahui kemandirian, dan efektivitas dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 2) Mengetahui daerah mana yang memiliki kemampuan keuangan daerah tertinggi dan terendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 3) Untuk mengetahui arah trend kemandirian daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan dengan tahun dasar 2012. 4) Untuk mengetahui arah trend efektivitas keuangan daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan dengan tahun dasar 2012.

Manfaat penelitian antara lain: 1) Kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, agar dapat jadi pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan daerah dengan melihat kondisi keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 2) Kepada akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi rujukan bahan penelitian, sebagai wawasan dan pengetahuan dalam melihat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung melaksanakan otonomi daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 3) Kepada masyarakat umum, diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait kemampuan keuangan daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Otonomi Daerah**

Menurut (Mardiasmo, 2004) otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya berdasarkan kepentingan umum. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dalam rangka kesejahteraan, melalui peran masyarakat, serta meningkatkan pengelolaan potensi daerah secara maksimal dan bertanggung jawab, mengurangi beban campur tangan pemerintah pusat serta memberikan kesempatan kepada daerah untuk menjalankan pemerintahannya secara mandiri (Bastian, 2001).

### **Keuangan Daerah**

Ahmad Yani (Yani, 2009) menjelaskan keuangan daerah yaitu semua hak dan kewajiban daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk semua bentuk kekayaan yang sudah diatur dalam undang-undang. Penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, pelimpahan wewenang serta pembiayaan dari pusat ke daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah harus memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya diharapkan dapat mendorong keuangan daerah dalam meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

### **Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Menurut Abdul Halim (Halim, 2004) menjelaskan APBD yaitu suatu rencana kegiatan daerah yang ditulis dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber dari penerimaan yang merupakan target minimal serta biaya batas maksimal untuk suatu periode anggaran. (Nurlan, 2008) menyebutkan struktur dalam APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **Kemandirian Daerah**

Menurut (Halim, 2007) Rasio kemandirian daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri, dengan cara membandingkan PAD dengan pendapatan dari sumber lain, seperti bantuan dari pusat dan pinjaman. rumus sebagai berikut :

$$RRKD = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100$$

Semakin tinggi tingkat persentasenya semakin besar tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Daerah dapat dikatakan mandiri apabila ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, dan menjadikan PAD sumber utama dalam penerimaan daerah. Dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Kriteria Rasio Kemandirian Daerah**

<b>Kemampuan Daerah</b>	<b>Kemandirian</b>	<b>Pola Hubungan</b>
<b>Rendah Sekali</b>	<b>0 % - 25 %</b>	<b>Instruktif</b>
<b>Rendah</b>	<b>25 % - 50 %</b>	<b>Konsultif</b>
<b>Sedang</b>	<b>50 % - 75 %</b>	<b>Partisipatif</b>
<b>Tinggi</b>	<b>75 % - 100 %</b>	<b>Delegatif</b>

Sumber : (Aryanto, 2011)

### **Efektivitas Keuangan Daerah**

Abdul Halim (Halim, 2007) Rasio Efektivitas PAD digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam merealisasi PAD yang sudah ditargetkan. Dalam menghitung Rasio Efektivitas dapat digunakan rumus:

$$\text{Rumus Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dalam mengukur tingkat rasio efektivitas dapat dilihat melalui kriteria pada tabel 1.2 dibawah ini

**Tabel 1.2**  
**Kriteria Rasio Efektivitas PAD**

Rasio Efektivitas PAD	Persentase
< 100 %	Tidak Efektif
= 100 %	Berimbang
> 100 %	Efektif

Sumber : Mohammad Mahsun (2009) dalam (Latifah, 2017)

Apabila persentase lebih dari besar dari 100 % maka dapat dikatakan efektif sedangkan bila lebih kecil dari 100 % tidak efektif dan sama dengan 100 % berimbang

### **Trend Kemandirian Daerah Dan Efektivitas Keuangan Daerah**

(Amin, 2000) menjelaskan trend berfungsi untuk mengetahui perkembangan arah perusahaan. Yaitu dengan menetapkan tahun dasar dan membandingkannya dengan tahun sesudahnya. Tahun dasar dinyatakan dengan angka 100 persen sehingga angka sesudahnya ditetapkan berdasarkan angka dari persentase tahun dasar. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Trend Kemandirian Daerah} = \frac{\text{KD Pada } t1}{\text{KD Pada } t0} \times 100$$

$$\text{Trend Efektiiitas PAD} = \frac{\text{EPAD Pada } t1}{\text{EPAD Pada } t0} \times 100$$

Apabila angka tahun sesudahnya lebih besar daripada 100 persen artinya terjadi perkembangan yang baik. Semakin besar persentase yang diperoleh maka perkembangan kemandirian suatu daerah semakin baik, sebaliknya apabila dibawah 100 persen artinya terjadi penurunan persentase kemandirian daerah.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya oleh Dori Saputra 2008 dengan judul Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat , hasil penelitian tersebut antara lain: a. Kemandirian daerah, secara umum

berada dirata-rata rasio 7,3% tahun 2004, 7,5% tahun 2015, 5,9% tahun 2006, 5,6% tahun 2007, 4,9% tahun 2008, 5,7% tahun 2009, 7,3% tahun 2010, 7,6% tahun 2011, secara keseluruhan tahun 2004 sampai 2011 berada pada rata-rata 6,5% masuk kategori sangat rendah. b. Efektivitas PAD secara keseluruhan tahun 2004 sampai 2011 memiliki rata-rata sebesar 109,8% masuk kriteria efektif. 3) trend kemandirian daerah secara keseluruhan tahun 2005 sampai 2011 berada pada rata-rata 95,3% artinya turun pada tahun dasar. 4) trend efektivitas PAD tahun 2005 sampai 2011 secara keseluruhan berada pada rata-rata 166,2% artinya naik pada tahun dasar.

Penelitian yang dilakukan A.A.N.B. Dwiranda 2006 dengan judul Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2002 – 2006. Penelitian ini menggunakan rasio kemandirian dan efektivitas keuangan daerah serta rumus trend kemandirian dan efektivitas keuangan daerah. Hasilnya adalah 1. Tingkat kemandirian daerah ditujuh kabupaten masuk kriteria sangat rendah, kecuali Denpasar dan Bandung. 2. Tingkat efektivitas keuangan masuk kategori cukup efektif sampai dengan sangat efektif.

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian diarahkan untuk menganalisis tingkat kemandirian, efektivitas, dan trend kemandirian dan efektivitas keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2012-2016.

### **Jenis Dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kuantitatif, dengan cara memberikan gambaran suatu keadaan dengan menggunakan data angka sebagai alat analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diteliti meliputi anggaran realisasi keuangan daerah. Sumber data penelitian diperoleh dari dinas Keuangan Daerah dan dinas/ instansi yang terkait.

### **Teknik Pengumpul Data**

Teknik yang digunakan yaitu dokumentasi dengan cara mencatat dan mengolah data melalui Dinas Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan Studi Pustaka untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas melalui literatur seperti buku, jurnal serta perundang-undangan yang berlaku. dalam penelitian ini digunakan beberapa rasio-rasio untuk mengukur kemampuan keuangan daerah melalui data realisasi anggaran sebagai berikut:

#### **a. Kemandirian Daerah**

Mengetahui seberapa besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara mandiri. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$RRKD = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100$$

#### **b. Efektivitas Keuangan Daerah**

Efektivitas dalam keuangan daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar pencapaian anggaran PAD. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rumus Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

#### **c. Trend Kemandirian Daerah**

Kemandirian daerah merupakan indikator penting keberhasilan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi, Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan kemampuan daerahnya. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Trend Kemandirian Daerah} = \frac{KD \text{ Pada } t1}{KD \text{ Pada } t0} \times 100$$

#### **d. Trend Efektivitas Keuangan Daerah**

Dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah, dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan target yang telah dibuat. Oleh karena itu penting untuk mengetahui arah perkembangan dari efektivitas PAD suatu daerah. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Trend Efektivitas PAD} = \frac{EPAD \text{ Pada } t1}{EPAD \text{ Pada } t0} \times 100$$

#### **Definisi Operasional Variabel**

- a.** Rasio kemandirian daerah adalah kemampuan untuk membiayai sendiri kegiatan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerahnya dengan seminimal mungkin mengurangi dana dari sumber lain (Pendapatan Transfer). Angka yang digunakan dalam bentuk satuan rupiah dan hasil yang dihasilkan dalam bentuk persen.
- b.** Rasio efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam merealisasi PAD yang sudah ditargetkan. Angka yang digunakan dalam bentuk satuan rupiah dan hasil yang dihasilkan dalam bentuk persen.
- c.** Trend kemandirian daerah memiliki fungsi untuk melihat arah dari perkembangan kemandirian daerah. Angka yang digunakan berupa satuan rupiah dan hasil yang dihasilkan dalam bentuk persen.
- d.** Trend efektivitas keuangan daerah berfungsi untuk melihat perkembangan dari efektivitas keuangan daerah. Angka yang digunakan berupa satuan rupiah dan hasil yang dihasilkan dalam bentuk persen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Kalimantan Selatan dengan Ibu Kota Banjarmasin merupakan salah satu bagian dari Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Selatan terletak diantara 144 19'33" – 116 33'28" BT dan 1 21'49" – 1 10'14" LS dengan luas 37.377,53 m<sup>2</sup> dengan ketinggian diatas 25-100 meter diatas permukaan laut.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan selatan. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 3.636.616 jiwa, kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 3.695.124 jiwa, kemudian meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 3.790.071 jiwa dan pada tahun 2014 sebesar 3.846.312 jiwa dengan rata – rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,70 persen pertahun. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki total jumlah kecamatan sebanyak 152 dan 2.008 desa pada tahun 2015. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 3,84 persen naik menjadi 4,38 persen pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017 sebesar menjadi 5,29 persen.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Kemandirian Daerah

Bedasarkan perhitungan ada beberapa hal yang diketahui yaitu: 1) Kemandirian daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum berada dirata-rata rasio 6,73% tahun 2012, 8,66% tahun 2013, 11,18% tahun 2014, 10,90% tahun 2015, dan 10,19% tahun 2016. Secara keseluruhan pada tahun 2012 sampai 2016 berada pada rata-rata 9,53% masuk dalam kategori rendah sekali. 2) Kota Banjarmasin memperoleh perhitungan rasio rata-rata tertinggi dari tahun 2012-2016 yaitu sebesar 16,86% dibandingkan dengan daerah lain. Akan tetapi masuk dalam kategori rendah sekali. 3) Kabupaten Tapin memperoleh perhitungan rasio rata-rata terendah dari tahun 2012-2016 yaitu sebesar 5,15% dibandingkan dengan daerah lain. Berikut rinciannya pada tabel 1.3

**Tabel 1.3**  
**Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**  
**Kabupaten/ Kota Tahun 2012-2016 Di Provinsi**  
**Kalimantan Selatan (Dalam Persen)**

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
Banjarmasin	13,02	14,96	17,79	19,13	19,43	16,86
Banjarbaru	10,04	11,89	17,23	18,53	18,84	15,30
Barito Kuala	2,99	3,98	7,65	6,31	5,10	5,20
Banjar	13,57	18,42	15,03	12,97	12,47	14,49
Hulu Sungai Selatan	6,02	6,88	10,31	9,91	8,82	8,38
Balangan	3,76	4,43	7,34	5,5	4,84	5,17

Tanah Laut	7,66	9,22	12,56	12,61	11,42	10,69
Tanah Bumbu	6,21	9,05	10,94	10,24	8,62	9,01
Tapin	3,92	4,70	6,3	5,54	5,33	5,15
Hulu Sungai Tengah	5,57	6,40	10,52	8,12	8,28	7,77
Hulu sungai Utara	4,65	5,88	11,2	9,98	8,59	8,06
Kotabaru	5,31	9,23	9,49	11,98	10,96	9,39
Tabalong	4,84	7,55	9,07	10,98	9,84	8,45
Rata-Rata	6,73	8,66	11,18	10,90	10,11	9,53

Sumber: Data diolah dalam penelitian ini, 2018

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam membiayai sendiri belanja daerah masih sangat rendah, tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah tersebut salah satunya disebabkan partisipasi peran masyarakat yang masih kurang berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan PAD. Pajak dan retribusi dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara mandiri, disamping meningkatkan penerimaan daerah melalui BUMD dan penerimaan lainnya. Berdasarkan penelitian terdahulu Dori Saputra (2008), tingkat kemandirian yang rendah menunjukkan suatu pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat dan daerah, sebaliknya tingkat kemandirian yang tinggi artinya suatu daerah memiliki kemampuan keuangan daerah yang mandiri dalam membiayai belanja daerahnya. Pemerintah daerah harus mempunyai terobosan yang baik dalam meningkatkan semua potensi sumber daya yang ada serta juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun daerahnya dan mulai mengurangi tingkat kergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dan daerah, diharapkan dengan terobosan yang baik dapat memberikan perubahan bagi daerah sehingga mampu membiayai belanja daerahnya secara mandiri.

## 2. Efektivitas Keuangan Daerah

**Tabel 1.4**  
**Perhitungan Rasio Efektivitas PAD**  
**Kabupaten/ Kota Tahun 2012-2016 Di Provinsi**  
**Kalimantan Selatan (Dalam Persen)**

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
Banjarmasin	109,65	106,18	107,80	91,75	91,97	101,47
Banjarbaru	138,76	120,87	133,05	109,39	108,92	122,20
Barito Kuala	104,09	146,37	160,29	122,86	122,70	131,26
Banjar	140,05	115,29	105,83	105,09	118,75	117,00

Hulu Sungai Selatan	<b>93,43</b>	<b>96,36</b>	<b>118,43</b>	<b>106,00</b>	<b>143,21</b>	<b>111,48</b>
Balangan	<b>140,12</b>	<b>155,25</b>	<b>142,67</b>	<b>133,83</b>	<b>161,04</b>	<b>139,39</b>
Tanah Laut	<b>140,94</b>	<b>131,62</b>	<b>142,32</b>	<b>123,31</b>	<b>117,34</b>	<b>131,11</b>
Tanah Bumbu	<b>124,61</b>	<b>130,90</b>	<b>122,72</b>	<b>108,02</b>	<b>122,16</b>	<b>121,69</b>
Tapin	<b>121,66</b>	<b>122,32</b>	<b>108,47</b>	<b>101,49</b>	<b>92,15</b>	<b>109,22</b>
Hulu Sungai Tengah	<b>107,46</b>	<b>100,00</b>	<b>94,46</b>	<b>101,31</b>	<b>96,99</b>	<b>100,04</b>
Hulu sungai Utara	<b>107,69</b>	<b>134,69</b>	<b>144,32</b>	<b>107,12</b>	<b>112,08</b>	<b>121,18</b>
Kotabaru	<b>85,29</b>	<b>124,14</b>	<b>108,22</b>	<b>136,44</b>	<b>104,21</b>	<b>111,66</b>
Tabalong	<b>87,37</b>	<b>102,03</b>	<b>101,39</b>	<b>108,75</b>	<b>118,88</b>	<b>103,69</b>
Rata-Rata	<b>115,47</b>	<b>122,00</b>	<b>122,30</b>	<b>111,95</b>	<b>116,18</b>	<b>117,58</b>

*Sumber: Data diolah dalam penelitian ini, 2018*

Dalam tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dikategorikan menjadi tidak efektif dengan kisaran dibawah 100%, Berimbang dengan berada kisaran 100%, dan efektif dikisaran diatas 100%. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan beberapa hal yang diketahui yaitu:

1) Tingkat efektivitas PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum berada dirata-rata rasio 115,47% tahun 2012, 122,00% tahun 2013, 122,30% tahun 2014, 111,95% tahun 2015, dan 116,18% tahun 2016, secara keseluruhan pada tahun 2012 sampai 2016 berada pada rata-rata 117,58% masuk dalam kategori efektif kecuali Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada kategori berimbang dengan perhitungan rata-rata sebesar 100,04%. 2) Kabupaten Balangan memperoleh perhitungan tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata tertinggi dari tahun 2012-2016 yaitu sebesar 139,39% dibandingkan dengan daerah lain. 3) Kabupaten Hulu Sungai Tengah memperoleh perhitungan tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata terendah dari tahun 2012-2016 yaitu sebesar 100,04% dibandingkan dengan daerah lain. Yang masuk dalam kategori berimbang.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan efektivitas keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 sampai 2016 secara umum masuk dalam kategori efektif. Ini menunjukkan pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja yang baik dalam merealisasikan target yang telah dibuat.

### 3. Trend Kemandirian Daerah

**Tabel 1.5**  
**Trend Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**  
**Kabupaten/ Kota Tahun 2012-2016 Di Provinsi**  
**Kalimantan Selatan (Dalam Persen)**

	2013	2014	2015	2016
Banjarmasin	<b>114,90</b>	<b>136,63</b>	<b>146,92</b>	<b>149,23</b>
Banjarbaru	<b>118,42</b>	<b>171,61</b>	<b>184,56</b>	<b>187,64</b>

---

Barito Kuala	<b>133,11</b>	<b>255,85</b>	<b>211,03</b>	<b>170,56</b>
Banjar	<b>135,74</b>	<b>110,75</b>	<b>95,578</b>	<b>91,89</b>
Hulu Sungai Selatan	<b>114,28</b>	<b>171,26</b>	<b>164,61</b>	<b>146,51</b>
Balangan	<b>117,81</b>	<b>195,21</b>	<b>146,27</b>	<b>128,72</b>
Tanah Laut	<b>120,36</b>	<b>163,96</b>	<b>164,62</b>	<b>149,08</b>
Tanah Bumbu	<b>145,73</b>	<b>176,16</b>	<b>164,89</b>	<b>138,80</b>
Tapin	<b>119,89</b>	<b>160,71</b>	<b>141,32</b>	<b>135,96</b>
Hulu Sungai Tengah	<b>114,90</b>	<b>188,86</b>	<b>145,78</b>	<b>148,65</b>
Hulu sungai Utara	<b>126,45</b>	<b>240,86</b>	<b>214,62</b>	<b>184,73</b>
Kotabaru	<b>173,82</b>	<b>178,71</b>	<b>225,61</b>	<b>206,40</b>
Tabalong	<b>155,99</b>	<b>187,39</b>	<b>226,85</b>	<b>203,30</b>
Rata-Rata	<b>130,10</b>	<b>179,84</b>	<b>171,74</b>	<b>148,45</b>

---

*Sumber: Data diolah dalam penelitian ini, 2018*

Tahun dasar yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tahun 2012 untuk melihat arah perkembangan kemandirian daerah pada tahun 2013 sampai 2016. Apabila angka tahun berikutnya lebih besar daripada 100 persen artinya terjadi perkembangan yang baik. sebaliknya apabila dibawah 100 persen artinya terjadi penurunan persentase kemandirian daerah. berdasarkan perhitungan yang dilakukan ada beberapa hal yang diketahui yaitu:

1) Trend kemandirian daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum berada dirata-rata rasio 130,10% tahun 2013, naik menjadi 179,84% tahun 2014, turun menjadi 171,74% tahun 2015, dan turun lagi menjadi 148,45% tahun 2016, secara keseluruhan pada tahun 2013 sampai 2016 trend kemandirian daerah berada pada rata-rata 157,53% artinya meningkat dibandingkan dengan tahun dasar. 2) Semua daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami trend positif dibandingkan tahun dasar kecuali Kabupaten Banjar pada tahun 2015 dan 2016. Dan daerah yang terus mengalami trend peningkatan adalah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, sedangkan Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong juga mengalami trend yang baik akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan. 3) Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang cenderung mengalami trend penurunan kemandirian daerah adalah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Meskipun mengalami penurunan, daerah Kabupaten dan Kota tersebut mengalami trend yang positif dibandingkan tahun dasar.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan trend kemandirian Kota/ Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 sampai 2016 secara umum berada pada rata-rata 157,53%. Ada peningkatan kemandirian daerah yang signifikan

dibandingkan dengan tahun 2012, menunjukkan pemerintah daerah tersebut memiliki arah perkembangan yang baik dalam meningkatkan kemandirian daerahnya.

#### 4. Trend Efektivitas Keuangan Daerah

**Tabel 1.6**  
**Trend Rasio Efektivitas PAD**  
**Kabupaten/ Kota Tahun 2012-2016 Di Provinsi**  
**Kalimantan Selatan (Dalam Persen)**

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016
Banjarmasin	<b>96,83</b>	<b>98,31</b>	<b>83,67</b>	<b>83,87</b>
Banjarbaru	<b>87,10</b>	<b>95,88</b>	<b>78,83</b>	<b>78,49</b>
Barito Kuala	<b>140,61</b>	<b>153,99</b>	<b>118,03</b>	<b>117,87</b>
Banjar	<b>82,32</b>	<b>75,56</b>	<b>75,03</b>	<b>84,79</b>
Hulu Sungai Selatan	<b>103,13</b>	<b>126,75</b>	<b>113,45</b>	<b>153,28</b>
Balangan	<b>110,79</b>	<b>101,81</b>	<b>95,51</b>	<b>114,93</b>
Tanah Laut	<b>93,38</b>	<b>100,97</b>	<b>87,49</b>	<b>83,25</b>
Tanah Bumbu	<b>105,04</b>	<b>98,48</b>	<b>86,68</b>	<b>98,03</b>
Tapin	<b>100,54</b>	<b>89,15</b>	<b>83,42</b>	<b>75,74</b>
Hulu Sungai Tengah	<b>93,057</b>	<b>87,90</b>	<b>94,27</b>	<b>90,25</b>
Hulu sungai Utara	<b>125,07</b>	<b>134,01</b>	<b>99,47</b>	<b>104,07</b>
Kotabaru	<b>145,55</b>	<b>126,88</b>	<b>159,97</b>	<b>122,18</b>
Tabalong	<b>116,77</b>	<b>116,04</b>	<b>124,47</b>	<b>136,06</b>
Rata-Rata	<b>107,70</b>	<b>108,13</b>	<b>100,02</b>	<b>103,29</b>

*Sumber: Data diolah dalam penelitian ini, 2018*

Tahun dasar yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tahun 2012 yang digunakan untuk melihat arah perkembangan efektivitas PAD pada tahun 2013 sampai 2016. Apabila angka tahun berikutnya lebih besar daripada 100 persen artinya terjadi perkembangan yang baik. sebaliknya apabila dibawah 100 persen artinya terjadi penurunan persentase efektivitas PAD. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan ada beberapa hal yang diketahui yaitu:

1) Trend efektivitas keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum berada dirata-rata rasio 107,70% tahun 2013, naik menjadi 108,13% tahun 2014, turun menjadi 100,02% tahun 2015, dan naik menjadi 103,29% tahun 2016, secara keseluruhan pada tahun 2013 sampai 2016 trend efektivitas keuangan daerah berada pada rata-rata 104,78% artinya meningkat dibandingkan dengan tahun dasar. 2) Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang tingkat efektivitas PAD nya terus mengalami trend positif dibandingkan tahun dasar adalah Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten tabalong, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 akan tetapi meningkat pada tahun 2016. 3) Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

yang cenderung mengalami trend negatif adalah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan trend efektivitas Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 sampai 2016 secara umum berada pada rata-rata 104,78%. Ada peningkatan efektivitas keuangan daerah dibandingkan dengan tahun 2012, walaupun tidak signifikan ini menunjukkan pemerintah daerah tersebut memiliki arah perkembangan yang baik dalam meningkatkan kinerja keuangannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Rasio kemandirian daerah pada tahun 2012 sampai 2016 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum masuk dalam kategori sangat rendah. Artinya ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat masih tinggi ini diakibatkan penerimaan PAD yang masih rendah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama dari pajak dan retribusi daerah. Daerah Kabupaten dan Kota yang memperoleh perhitungan rasio kemandirian daerah tertinggi adalah Kota Banjarmasin, sedangkan Kabupaten Tapin memperoleh perhitungan rasio rata-rata terendah. Trend kemandirian secara umum pada tahun 2013 sampai 2016 berada pada rata-rata 157,53% artinya meningkat dibandingkan dengan tahun dasar. Trend yang cenderung mengalami peningkatan adalah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, sedangkan Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong juga mengalami trend yang baik akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan. Sedangkan trend kemandirian daerah yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Meskipun mengalami penurunan daerah Kabupaten dan Kota tersebut mengalami kemandirian daerah yang positif dibandingkan tahun dasar.

Rasio Efektivitas PAD Pada tahun 2012 sampai 2016 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum masuk kategori yang efektif, ini menunjukkan tingkat kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan Kota dalam merealisasikan potensi riil Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target penerimaan sudah sangat baik. Daerah Kabupaten dan Kota yang memperoleh perhitungan rasio efektivitas PAD tertinggi adalah Kabupaten Balangan, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah memperoleh perhitungan rasio rata-rata terendah. Trend efektivitas PAD secara umum pada tahun 2013 sampai 2016 berada pada rata-rata 104,78% artinya meningkat dibandingkan dengan tahun dasar. Trend efektivitas yang

mengalami trend positif dibandingkan tahun dasar adalah Kabupaten Barito Kuala Kabupaten, Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tabalong, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 akan tetapi meningkat pada tahun 2016. Sedangkan trend efektivitas yang cenderung mengalami trend negatif adalah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten tanah Bumbu, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai tengah.

### **Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dianalisis serta kesimpulan-kesimpulan, maka Saran yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan ataupun kepada peneliti selanjutnya adalah:

1. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam merencanakan dan realisasi target APBD perlu mempertimbangan rasio kemandirian daerah dan efektivitas PAD sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pemerintah suatu dalam melaksanakan pembangunan didaerah.
2. Peningkatan PAD harus terus dilakukan seiring dengan penetapan besaran dana pemerimbangan yang diterima dari pusat. artinya seiring peningkatan PAD pemerintah daerah harus terus mengupayakan mulai mengurangi tingkat ketergantungan kepada dana transfer baik pusat dan daerah.
3. Dalam menyusun dan merealisasikan APBD sebaiknya perlu memperhatikan potensi sumber daya yang ada, serta pola perkembangan kemampuan keuangan daerahnya agar lebih terarah dan terstruktur sehingga menuju daerah yang lebih baik.
4. Meningkatkan kesadaran serta peran masyarakat dalam berkontribusi dalam membangun daerah perlu ditingkatkan, sehingga dapat membantu meningkatkan target serta realisasi PAD nya.
5. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian serta menambah perhitungan rasio lainnya yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun serta merealisasikan anggaran menjadi lebih baik.

### **Keterbatasan Penelitian**

Peneliti terus berupaya untuk merancang serta mengembangkan penerlitan ini menjadi lebih baik, namun masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini yang kedepanya bisa diperbaiki antara lain:

1. Ruang lingkup hanya meneliti Kabupaten dan Kota di Provinsi kalimantan Selatan, sehingga belum dapat melihat secara penuh kemampuan keuangan daerah secara nasional.

2. Penelitian yang dilakukan hanya terfokus kepada rasio kemandirian daerah dan rasio efektivitas PAD sehingga masih memiliki keterbatasan dalam mengukur kinerja keuangan daerah secara menyeluruh. Selanjutnya diharapkan dalam penelitian kedepannya juga menggunakan rasio-rasio lainnya sebagai alat analisis penelitian.
3. Perhitungan dalam penelitian ini menggunakan data PAD murni, sehingga masih memiliki keterbatasan dalam menghitung secara menyeluruh kemampuan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Diharapkan kedepannya kepada peneliti selanjutnya juga memaksukan instrument PAD bagi hasil untuk mengetahui secara menyeluruh kemampuan keuangan daerah.

## DAFTAR REFERENSI

- A.A.N.B. Dwirandra. (2006). Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Proponsi Bali Tahun 2002-2006 (Skripsi). Universitas Udayana Bali
- Amin, W. T. (2000). *Dasar Dasar Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aryanto, R. (2011). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera. *Jurnal Ilmiah IAIN Raden Fatah Palembang Vol III No 2*.
- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia* . Yogyakarta: BPFE.
- Dori, Saputra (2014). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, Artikel Imilah Universitas Negeri Padang
- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salema Empat.
- Latifah, J. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tapin*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mudrajad, K. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi Perencanaan Strategis dan Peluang*. Jakarta: Airlangga.
- Nurlan, D. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Yani, A. (2009). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

